

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi merupakan inti dari demokrasi. Dan komunikasi politik adalah satu hal yang ada di setiap negara demokrasi. Sedangkan demokrasi sendiri adalah tatanan hidup bernegara yang sudah menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya.

Menurut *World Forum on Democracy*, total negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 dari penduduk dunia. Demokrasi menjadi sistem politik yang telah dipilih oleh Negara Indonesia sejak Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Sejarah mencatat Indonesia telah melalui berbagai dinamika pemerintahan yang berdampak pada pasang surutnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Demokrasi yang ada di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Perubahan konsep demokrasi sendiri terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer hingga demokrasi presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 serta amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai subjek pemerintahan, tidak menjadi objek pemerintahan. Artinya,

rakyat ikut serta dalam setiap proses jalannya pemerintahan. Karena rakyat menjadi subjek pemerintahan, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat akan semakin baik kualitas demokrasi di Negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Demokrasi Negara Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir, setidaknya itu yang dilaporkan oleh The Economist Intelligence Unit. Laporan tersebut menunjukkan Negara Norwegia mendapat skor tertinggi sebesar 9,81 dan menjadikan Norwegia dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Laporan itu lalu menyebutkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa pada demokrasi dan kebebasan di dunia.

Kita mengetahui bersama bahwa demokrasi yang kita rasakan saat ini lahir dari tuntutan masyarakat barat yang menuntut tentang persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada waktu sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga tidak dibeda-bedakan kedudukannya baik di hadapan hukum maupun pada tatanan sosial masyarakat baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan.

Secara umum, diberbagai belahan dunia yang masih kental akan budaya patriarkhi, partisipasi perempuan masih sangat minim di dunia politik. Bahkan Amerika Serikat yang diakui sebagai negara demokrasi terbesar, bisa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memberikan hak pilihnya setelah 144 tahun negara tersebut merdeka. Padahal kita

mengetahui bersama bahwa kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di Amerika Serikat telah berkembang secara pesat sejak publikasi John Stuart Mill pada tahun 1869 yang mana terinspirasi istrinya yaitu Harriet Taylor berjudul *The Subjection of Women*. Yang sudah-sudah perempuan baru sebatas objek pembangunan dan belum menjadi subjek pembangunan. Salah satu penyebabnya karena pada tataran kebijakan masih banyak yang bias gender.

Di Indonesia, kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi ke dunia politik secara nyata dimulai dari Gerakan Istri Sedar yang berdiri sejak 1930. Perhimpunan ini muncul atas dasar permasalahan perempuan Indonesia yang merebak dan adanya keinginan untuk memperbaiki serta menjunjung tinggi derajat perempuan Indonesia, tidak terbatas pada perempuan kalangan atas. Perjuangan ini penting karena posisi politik yang dapat diisi oleh perempuan merupakan salah satu usaha perbaikan status perempuan di Indonesia.¹

Perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan sudah terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Keberadaan paham patriarki di masyarakat, membentuk pemahaman bahwa laki-laki lebih superior di semua lini kehidupan. Terjadinya pembedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan telah turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan ini termanifestasi dalam bentuk stereotip,

¹ Kompas.com, 8 Maret 2020

marjinalisasi, subordinasi dan bahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Adanya anggapan yang selama ini melekat dalam benak masyarakat sehingga mendomestifikasi peran perempuan yang hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga. Sementara laki-laki dianggap sebagai pelaku sentral dalam keluarga. Dalam dunia kerja, tak jarang kaum perempuan mengalami marjinalisasi atau proses peminggiran. Salah satu contohnya adalah perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah upah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja.² Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan pun masih termarginalisasi.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil pemilu 2019-2024 persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 20,52 persen. Dalam pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan, perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS tidak sampai 30 persen.³ Dalam tindak kekerasan, perempuan kerap menjadi objek. Sekitar 1 diantara 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan selama hidupnya sementara untuk yang mengalami kejadian tersebut dalam 12 bulan terakhir ada 1 dari 10 orang perempuan menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016.⁴

² BPS & KPPPA, 2016a

³ BPS & KPPPA, 2016b

⁴ BPS, Maret 2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah perempuan yang menduduki DPR RI dari sejak pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2019.

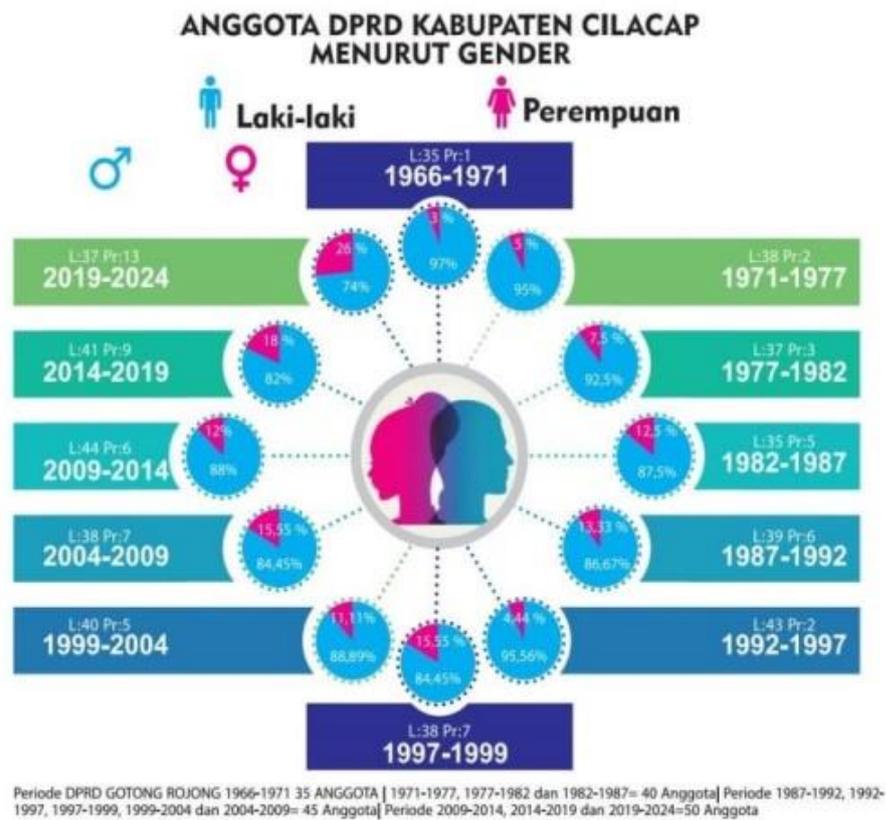
PEMILU	TOTAL ANGGOTA DPR RI	JUMLAH PEREMPUAN	PERSENTASE
1955	272	17	6,25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6,30
1982	460	39	8,48
1987	500	65	13,00
1992	500	62	12,50
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86
2014	560	97	17,32
2019	575	118	20,05

Meski hasil pemilu 2019 belum mencapai 30 persen namun terjadi konsistensi kenaikan jumlah perempuan yang menduduki DPR RI sejak pemilu 1955.

Partisipasi perempuan menjadi kunci dari kualitas demokrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi. Kabupaten Cilacap adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Indonesia.

Politik Indonesia hingga saat sekarang masih terus berkembang. Banyak kemajuan dalam penerapan hak-hak politik, kebebasan sipil dan pelembagaan demokrasi. Meski masih banyak kelemahan yang harus kita perbaiki.

Berikut ini adalah info grafis yang menjelaskan bagaimana partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2024.



Dari info grafis tersebut bisa dilihat bahwa perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap sejak 1966 sampai 2024 belum pernah memenuhi kuota perempuan 30%. Dan secara presentase terjadi fluktuasi jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Cilacap.

Peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi dan komunikasi politik perempuan Kabupaten Cilacap. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Cilacap termasuk kabupaten yang anggota DPRD perempuannya belum mencapai kuota 30%. Selain dari peneliti memandang penting untuk

meneliti partisipasi dan komunikasi politik perempuan Cilacap guna sebagai bahan kajian dan juga sebagai pijakan untuk meningkatkan partisipasi dan komunikasi politik perempuan Cilacap.

Peneliti juga memandang penting untuk meneliti dengan presentase tidak mencapai 30% itu bagaimana keberjalanan partisipasi dan komunikasi politik anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap periode 2019-2024.

Demikian latar belakang masalah yang membuat peneliti memilih judul “Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Cilacap 2019-2024”.

B. Definisi Operasional

1. Partisipasi

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.

Secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu : participation artinya pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sedangkan secara terminology sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya

untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut”.⁵

Dari beberapa pengertian tersebut maka bisa disimpulkan partisipasi adalah keterlibatan seseorang sebagai subjek dari adanya usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Ketika melihat DPRD memiliki tiga fungsi pokok yaitu membuat peraturan daerah, mengontrol jalannya pemerintahan dan membuat anggaran. Maka yang dimaksud partisipasi di sini yaitu adalah keterlibatan seseorang (anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap periode 2019-2024) sebagai subjek dari adanya usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yaitu membuat peraturan daerah.

2. Komunikasi Politik Perempuan

Untuk memahami apa yang disebut dengan komunikasi politik tentu lebih mudah memahami terlebih dahulu apa yang disebut komunikasi lalu apa pula yang disebut politik. Dari dua rangkaian kata ini terjelma pengertian baru yang mungkin saja tidak sama dengan dua konsep komunikasi dan politik.

Kata komunikasi secara etimologis berasal dari kata latin *communication*. Istilah ini bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Komunikasi

⁵ Syamsuddin Adam dalam Teguh Iman Prasetya, Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput “Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”, (2008), hlm 54

terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan.⁶

Komunikasi adalah pengalihan informasi, gagasan dan sikap untuk memperoleh tanggapan atau saling berbagi informasi, gagasan dan sikap.⁷ Kalau melacak kepada terminologinya maka komunikasi, tulis Heryanto mengutip Hovland dkk (2002) adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain.

Laswell kata Heryanto mendefinsikan komunikasi sebagai *who says what in which channel to whom with what effect*. Menurut Onong, pesan komunikasi terdiri dari dua aspek yakni isi pesan (*the content of message*) dan lambing (*symbol*). Dengan kata lain, isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambing dan bahasa.

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Secara garis besar dalam proses komunikasi harus ada unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator dan komunikan.

Ponco Dewi dalam bukunya yang berjudul ilmu komunikasi mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi komunikasi. Beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli, yaitu:

⁶ Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 30

⁷ Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 2

Shanon:

“komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas bentuk komunikasi menggunakan Bahasa verbal tapi juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan dan teknologi”.

Carl I.Holvlund:

“komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain”.

Judy C Pearson & Paul E Melson:

“merupakan proses memahami dan berbagi makna”.

Harold Laswswell:

Komunikasi adalah suatu proses untuk menjelaskan siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Dengan siapa? Dengan berakibat apa?⁸

Deddy dalam bukunya yang berjudul ilmu komunikasi suatu pengantar menjelaskan bahwa tidak ada definisi yang benar ataupun yang salah tentang komunikasi. Definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya.⁹ Menurut Deddy komunikasi adalah suatu proses dinamis yang secara sinambung mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Orang-orang yang berkomunikasi adalah komunikator-komunikator yang aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan.¹⁰

Dengan demikian komunikasi adalah proses penyampaian pesan komunikator kepada komunikan baik itu disengaja maupun tidak sengaja, baik secara verbal maupun nonverbal dan pesan tersebut

⁸ Ponco Dewi, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm 3

⁹ Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Rosda Karya, 2021), hlm 46

¹⁰ Ibid, hlm 75

ditafsirkan oleh komunikan menjadi sebuah makna yang sama sehingga pesan tersebut mendapat *feed back* (umpan balik) dari komunikan.

a. Unsur-Unsur Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan komunikator kepada komunikan. Agar komunikasi dapat dikatakan menjadi komunikasi yang efektif, terjadinya komunikasi harus terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antarlain:

1) Komunikator (pengirim pesan)

Komunikator adalah seseorang yang mempunyai gagasan atau pikiran pertama untuk disampaikan kepada orang lain. Dalam proses komunikasi komunikator bisa terdiri satu orang atau dua orang lebih sesuai dengan bentuk komunikasi yang dijalankan.¹¹

2) Pesan

Pesan merupakan simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari komunikator yang akan disampaikan kepada komunikan. Simbol terpenting pesan adalah berupa kata-kata (bahasa) yang dapat mempresentasikan objek, gagasan dan perasaan baik berupa ucapan atau tulisan. Pesan juga bisa berupa nonverbal, seperti tindakan atau isyarat anggota tubuh, juga melalui musik, lukisan, tarian dan sebagainya.

3) Saluran

¹¹ Nurani, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2012), hlm 58

Saluran adalah alat yang digunakan sumber (komunikator) untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran bergantung pada bentuk pesan yang disampaikan baik itu pesan verbal atau nonverbal. Saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan baik itu secara langsung (tatap muka) atau lewat media cetak atau media elektronik.¹²

4) Penerima (komunikasikan)

Penerima merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran penerima pesan yang disampaikan komunikator.¹³

5) Efek

Dalam unsur komunikasi efek merupakan perubahan yang terjadi oleh penerima (komunikasikan) setelah ia menerima pesan dari sumber (komunikator). Perubahan tersebut bisa berupa tindakan, perilaku, pikiran dan lain-lainnya.¹⁴

6) Umpan balik (feedback)

Umpan balik merupakan respons, tanggapan atau reaksi penerima (komunikasikan) atas pesan yang diterima dan di tafsiri. Umpan balik bisa dalam bentuk netral, atau dalam bentuk mendukung (positif), atau dalam bentuk menolak (negatif).¹⁵

¹² Deddy, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: Rosdakarya, 2021), hlm 70

¹³ Ponco Dewi, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm 24

¹⁴ Deddy, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: Rosdakarya, 2021), hlm 71

¹⁵ Redy Panuju, Pengantar Studi Komunikasi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 39

Aristoteles adalah filosof Yunani, tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Model Aristoteles adalah model yang paling klasik atau disebut juga model retorik. Oleh karena itu, model ini merupakan penggambaran dari komunikasi retorik, komunikasi publik atau pidato. Aristoteles adalah orang pertama yang merumuskan model komunikasi verbal pertama. Proses komunikasi terjadi ketika ada seorang pembicara berbicara kepada orang lain atau khalayak lain dalam rangka merubah sikap mereka.

Aristoteles mengemukakan tiga unsur yang harus ada dalam proses komunikasi :

- a. Pembicara (speaker)
- b. Pesan (message)
- c. Pendengar (listener)

Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh :

- a. Siapa Anda (etos-kepercayaan anda)
- b. Apa argumen Anda (Logos-logika dalam pendapat Anda)
- c. Dengan memainkan emosi khalayak (pathos-emosi khalayak)

Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa proses komunikasi dipandang sebagai suatu yang statis dan tidak memperdulikan saluran, umpan balik, efek, dan kendala-kendala. Disamping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang disengaja (komunikator mempunyai keinginan secara sadar untuk merubah sikap orang lain).

Proses komunikasi memiliki makna transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan. Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua pihak yang terlibat dalam proses itu sendiri.

Komunikasi menurut para pakar yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Wilbur Schramm, komunikasi adalah saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap.¹⁶
- b) Menurut Harold D Laswell, komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa.
- c) Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang - lambang bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain.
- d) Menurut Charles H. Cooley, komunikasi berarti suatu mekanisme suatu hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu.¹⁷
- e) Menurut Louis A. Allen, komunikasi adalah jumlah total semua hal yang dilakukan seseorang, ketika ia ingin menciptakan pemahaman dalam pikiran orang lain.

¹⁶ Asep Syamsul dan M. Romli, *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis*, (Bandung: ASM. Romli, 2014), hlm 6-7

¹⁷ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Medpress, 2009), cetakan 1, hlm 6

Politik secara sederhana diartikan sebagai aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan bentuk susunan masyarakat, tulis Deliar Noer seperti dikutip Haryanto¹⁸

Menurut Miriam Budiardjo konsep pokok politik terkait dengan :

a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

c. Pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan diantara beberapa alternative sehingga keputusan itu tercapai.

d. Kebijakan public merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu.

e. Pembagian dan alokasi yakni pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat.

Ramlan Surbekti (1992) terdapat lima pandangan mengenai politik.

a. Politik adalah usaha bersama-sama yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

b. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

¹⁸ Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 2

- c. Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan
- d. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
- e. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dana tau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari komunikator kepada komunikan. Gabriel Almon berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan , agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik.

Komunikasi politik perempuan artinya proses penyampain pesan-pesan politik yang dilakukan oleh perempuan. Jika melihat definisi yang disampaikan oleh Gabriel Almond maka komunikasi politik perempuan yaitu komunikasi politik yang komunikatornya adalah seorang perempuan yang proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan , aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan.

Untuk memperfokus penelitian dalam hal ini komunikasi politik perempuan akan dibatasi maknanya hanya pada lingkup salah satu fungsi DPRD Kabupaten Cilacap yaitu membuat peraturan daerah. Maka jika disandingkan dengan pendapat Gabriel Almond maka komunikasi politik perempuan yaitu komunikasi politik yang komunikatornya adalah seorang perempuan yang proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan , aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan.

3. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Cilacap. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di Utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat) di sebelah Barat.

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Pebruari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.¹⁹

¹⁹ <https://cilacapkab.go.id/v3/sejarah-cilacap/> 20 Januari 2022

Asal usul pembentukan nama Kabupaten Cilacap itu terdapat dua makna menurut colonial pada masa tersebut yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 pertahun, yang kedua yaitu memerlukan persetujuan Raja Belanda, setelah menerima surat rahasia menteri colonial pemerintah Hindia Belanda dengan besluit gubernur jenderal tanggal 21 Maret 1856 nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).²⁰

Jadi definisi operasional tersebut yang menyusun judul yang peneliti pilih yaitu Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Cilacap 2019-2024).

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas yang menggambarkan tentang pembahasan Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan Kabupaten Cilacap tersebut. Maka diambil suatu rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana partisipasi anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024?
2. Bagaimana komunikasi politik anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024?

²⁰ <https://cilacapkab.go.id> Kamis, 25-November-2021

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Mengetahui bagaimana partisipasi anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024.
2. Mengetahui bagaimana komunikasi politik anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca, terutama untuk mahasiswa komunikasi penyiaran islam terkait dengan partisipasi dan komunikasi politik perempuan dalam hal ini anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024.

2. Manfaat praktis

Secara praktis dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi dan komunikasi politik anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024.

F. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian tentang **“Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan Periode 2019-2024 Kabupaten Cilacap) “**. Untuk menghindari adanya suatu kesamaan dengan penemuan-penemuan peneliti

lain. Maka dengan ini peneliti menentukan hasil penelitian lain yang memiliki adanya kaitan kesamaan dengan hasil peneliti, yaitu :

Jurnal dengan judul “Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia” Kuspuji Istiningdiah.

Letak perbedaan antara skripsi yang peneliti buat dengan jurnal diatas adalah waktu dan tempat yang berbeda, serta jenis penelitian. Namun ada persamaan dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan dengan jurnal diatas yaitu persamaannya adalah meneliti tentang partisipasi dan komunikasi politik perempuan.

Maka bisa disimpulkan bahwa penelitian skripsi yang peneliti lakukan belum pernah ada yang meneliti.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terkait hasil penelitian, memudahkan penyusun dan pembaca dalam mencari informasi terkait dengan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini yaitu meliputi :

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan landasan teori yang membahas

tentang seputar partisipasi dan komunikasi politik perempuan, mulai dari pengertian partisipasi dan pengertian komunikasi politik perempuan.

BAB III Merupakan langkah-langkah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang memuat jenis penelitian, pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV Merupakan pembahasan tentang gambaran umum dari subjek penelitian, serta pembahasan bagaimana partisipasi dan komunikasi politik anggota DPRD perempuan Kabupaten Cilacap Periode 2019-2024.

BAB V Merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian